



Article Informations

Received: 28/08/2024; Accepted:  
27/02/2025; Published: 27/02/2025

Corresponding Email:

kusumam219@gmail.com

## DOUBLE STANDARD POLICY HUNGARIA TERHADAP PENGUNGSI STUDI KASUS : PENGUNGSI UKRAINA DAN TIMUR TENGAH

**Kusuma Merbawono**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji fenomena standar ganda dalam kebijakan Hungaria terhadap pengungsi Ukraina dan Timur Tengah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis faktor-faktor historis dan perkembangan kedua kelompok pengungsi di Hungaria, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan terhadap mereka. Teori konstruktivis identitas model constitutive localization digunakan untuk memahami pembentukan identitas dan pengaruhnya terhadap kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam perlakuan terhadap pengungsi Ukraina dan Timur Tengah, yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan persepsi ancaman. Kebijakan Hungaria terhadap pengungsi Ukraina cenderung lebih terbuka dan akomodatif, sementara terhadap pengungsi Timur Tengah lebih restriktif. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas kebijakan pengungsi dan pentingnya mempertimbangkan konteks historis dan sosial dalam analisis kebijakan luar negeri.

**Kata Kunci** : Hungaria, Pengungsi, Standar Ganda, Ukraina, Timur Tengah, Konstruktivisme, Identitas

### **Abstract**

*This study examines the double standard phenomenon in Hungary's policies towards Ukrainian and Middle Eastern refugees. Using a qualitative descriptive approach and literature study method, this research analyzes historical factors and developments of both refugee groups in Hungary, as well as the policies implemented towards them. The constructivist identity theory with the constitutive localization model is employed to understand identity formation and its influence on policy. The results reveal significant differences in the treatment of Ukrainian and Middle Eastern refugees, influenced by historical, cultural, and threat perception factors. Hungary's policies towards Ukrainian refugees tend to be more open and accommodating, while those towards Middle Eastern refugees are more restrictive. This research contributes to a*

*deeper understanding of the complexities of refugee policies and the importance of considering historical and social contexts in foreign policy analysis.*

**Keywords** : *Hungary, refugees, double standards, Ukraine, Middle East, Konstruktivism, identity*

## **PENDAHULUAN**

Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, Uni Eropa dilanda kembali krisis migrasi besar-besaran. Krisis ini tak lain di latar belakang ketika negara Rusia menginvasi Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Krisis tersebut kurang lebih sama dengan yang terjadi pada tahun 2015 ketika Uni Eropa mengalami krisis migrasi yang juga dilatarbelakangi akibat gejolak politik domestik dan perang yang berkelanjutan di negara-negara Timur Tengah. Peristiwa yang cukup signifikan yang menyebabkan datangnya pengungsi Timur Tengah ke kawasan Eropa kala itu adalah Arab Spring yang merupakan fenomena atas ketidakkondusifan kondisi pemerintah negara-negara Timur Tengah.<sup>1</sup>

Pada akhir tahun 2015, berdasarkan laporan UNHCR jumlah angka yang masuk untuk pengungsi Timur Tengah ke Eropa berkisar 1.000.573 orang.<sup>2</sup> Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar yang belum pernah didapat Uni Eropa terkait pengungsi pada saat itu. Melihat fenomena krisis kala itu Uni Eropa merespon untuk membantu negara-negara yang menjadi tempat transit dan suaka paling banyak seperti Hungaria, Yunani, Italia, Jerman dan Perancis. Dengan mengeluarkan Council Decision (EU) 2015/1523. Isi dari keputusan itu adalah membagi beban pengungsi secara merata ke seluruh negara di Uni Eropa

dengan melihat beberapa indikator antara lain :

- A. Ukuran Populasi (40%)
- B. Total PDB (40%)

---

<sup>1</sup> Aziza, N. (2019) KEBIJAKAN HUNGARIA TERHADAP PENGUNGI DI EROPA PADA 2015-2017. thesis.

<sup>2</sup> Clayton, J.C. and Holland, H. (2015) Over one million sea arrivals reached Europe in 2015, UNHCR. Available at: <https://www.unhcr.org/news/stories/over-one-million-sea-arrivals-reach-europe-2015> (Accessed: 24 May 2023).

C. Jumlah aplikasi suaka dan jumlah pengungsi yang dimukimkan kembali per 1 juta penduduk selama periode 2010-2014 (10%)

D. Tingkat pengangguran (10%).<sup>3</sup>

Menariknya ketika Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan pemerataan kuota pengungsi berdasar pada kriteria yang sudah ditentukan oleh Uni Eropa, tidak sepenuhnya diterima begitu saja oleh seluruh negara anggota, salah satunya negara Hungaria yang menolak kebijakan relokasi pengungsi tersebut.

**Tabel 1.1 Relokasi Negara Eropa Tengah.**<sup>4</sup>

<b>Country</b>	<b>Commitment Legally foreseen</b>	<b>Places Formally pledged</b>	<b>Number of Relocated Refugees</b>	<b>Percentage of relocated persons in relation to legally foreseen</b>
Hungary	1294	0	0	0,0%
Czech Republic	2691	50	12	0.4%
Slovakia	902	60	16	1,8%
Poland	6182	100	0	0,0%

Berdasarkan tabel diatas pada 27 September 2017, Hungaria wajib menerima sebanyak 1294 pengungsi, namun Hungaria tidak menerima sama sekali kuota pengungsi yang diberikan. Keputusan tersebut dikeluarkan

---

<sup>3</sup> Monte, M.D. and Orav, A. (2023) Solidarity in EU asylum policy, EPRS | European Parliamentary Research Service. Available at: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649344/EPRS\\_BRI\(2020\)649344\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649344/EPRS_BRI(2020)649344_EN.pdf) (Accessed: 22 May 2023).

setelah pengadilan Eropa menolak pengaduan oleh Hungaria dan Slovakia tentang kebijakan migrasi UE pada tanggal 6 September 2017.<sup>5</sup>

Pada perkembangannya, per tanggal 24 Februari 2022 ketika negara Rusia menginvasi Ukraina, berdasarkan laporan UNHCR hanya dalam kurun waktu dua belas hari, lebih dari 2 juta pengungsi Ukraina memutuskan untuk mengungsi ke Uni Eropa.<sup>6</sup> Namun terdapat fenomena menarik ketika angka pengungsi Ukraina yang tercatat ini jauh berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan krisis pengungsi pada tahun 2015, negara-negara Eropa terkhusus negara Hungaria sebagai negara yang memosisikan dirinya sebagai negara sekuritisasi sejak krisis tahun 2015 lalu, kali ini negara Hungaria menunjukkan sikap yang berbeda dan sangat terbuka untuk menerima pengungsi asal Ukraina.

Sikap yang berbeda juga ditunjukkan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh negara Hungaria di perbatasan. Kebijakan yang dikeluarkan kepada pengungsi asal Timur Tengah pada tahun 2017, pemerintah Hungaria membangun pagar di perbatasan Hungaria-Serbia dalam rangka menghalangi masuknya gelombang pengungsi Timur Tengah dan Perdana Menteri Hungaria sebagai dewan sah yang mengesahkan RUU, mengesahkan aturan yang berisikan sanksi pidana kepada warga Hungaria yang memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap para pengungsi tersebut.<sup>7</sup> Hal tersebut jauh berbanding berbalik jika kita melihat kebijakan yang dikeluarkan negara Hungaria terhadap pengungsi asal Ukraina. Pada tanggal 21 Maret 2022 Gyorgi Bakondi sebagai Penasihat Kepala Keamanan Hungaria menyatakan :

“Pusat bantuan di perbatasan Hungaria-Ukraina sudah dipersiapkan dengan baik untuk menampung semakin banyak pengungsi yang melarikan diri dari Ukraina. Perdana

---

<sup>5</sup> Sabic, S.S. (2017b) *The Relocation of Refugees in the European Union Implementation of Solidarity and Fear*.

Available at:

[https://www.researchgate.net/publication/320452615\\_The\\_Relocation\\_of\\_Refugees\\_in\\_the\\_European\\_Union\\_Implementation\\_of\\_Solidarity\\_and\\_Fear](https://www.researchgate.net/publication/320452615_The_Relocation_of_Refugees_in_the_European_Union_Implementation_of_Solidarity_and_Fear) (Accessed: 22 May 2023).

<sup>6</sup> 'UKRAINE SITUATION FLASH UPDATE #1' (2022a) *UNHCR Regional Bureau for Europe* [Preprint].

<sup>7</sup> Wangke, Humphrey. 2016. *Krisis Migran dan Masa Depan Integrasi Eropa*, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. 8 No.3 (Februari) hlm 5-8.

Menteri Victor Orban juga melakukan kunjungan rutin ke perbatasan Hongaria-Ukraina untuk mengawasi manajemen dan upaya membantu para pengungsi”.<sup>8</sup>

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan antusiasme masyarakat Hungaria yang dinyatakan langsung oleh Alexandra Szentkirályi didalam konferensi pers. “Ucapan terima kasih kepada warga sipil dan organisasi amal yang membantu pengungsi dan donasi yang telah terkumpul lebih dari 800 juta forints (EUR 2,2juta) di bawah skema bantuan yang disebut Jembatan Transkarpatia”.<sup>9</sup>

Pernyataan yang Szentkirályi terdapat perbedaan masyarakat Hungaria asal Ukraina dan Timur tersebut dapat dilihat dibawah ini.

**In many European countries, unfavorable opinions of Muslims have become less common**  
*% who have an unfavorable opinion of Muslims in their country*

	2016	2019	Change
	%	%	
Hungary	72	58	-14
Italy	69	55	-14
UK	28	18	-10
Spain	50	42	-8
Greece	65	57	-8
Netherlands	35	28	-7
Sweden	35	28	-7
France	29	22	-7

Note: Only statistically significant differences shown.  
 Source: Spring 2019 Global Attitudes Survey, Q48c.  
 PEW RESEARCH CENTER

Transkarpatia”.<sup>9</sup> diucapkan oleh menyiratkan antusiasme kepada pengungsi Tengah. Hal dari data gambar

**Gambar 1.1 Hungary Responden**

Sumber: <https://www.pewresearch.org/global/2019/10/14/minority-groups/>

Berdasarkan persepsi yang dimiliki oleh publik Hungaria terhadap Islam, masyarakat menganggap pengungsi Timur Tengah sebagai dilema migrasi dan keadaan yang memungkinkan bisa menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Menyaksikan fenomena di atas ketimpangan yang dirasakan oleh pengungsi asal Timur Tengah ketika masuk ke negara-negara Eropa untuk mencari suaka yang tidak diperlakukan dengan baik dan perbedaan perlakuan negara-negara Eropa menerima pengungsi Ukraina dengan tangan terbuka, menimbulkan perhatian dunia Internasional, terutama organisasi

<sup>8</sup> Hungary Accepted the Largest Number of Refugees per Capita From Ukraine (2022) EU/Schengen Hungary . Available at: <https://www.schengenvisainfo.com/news/hungary-accepted-the-largest-number-of-refugees-per-capita-from-ukraine/> (Accessed: 30 May 2023).

<sup>9</sup>Society (2022) *Humanitarian council : Hungary received largest number of refugees per capita.*

Internasional UNHCR sebagai organisasi yang menaungi para pengungsi, termasuk elit politik, pakar kebijakan dan para akademisi yang mempertanyakan kepatuhan hal-hal normatif terkait Konvensi 1951 dan Protokol 1967, serta kebijakan pemerataan pengungsi sejak krisis pertama tahun 2015 lalu, yang dikeluarkan langsung oleh organisasi antarpemerintah atau regional seperti Uni Eropa. Negara Hungaria sebagai negara yang telah meratifikasi dan masuk pada bagian keanggotaan dari organisasi yang dinaunginya, Hungaria sudah sepatutnya tidak memilah atau melakukan pembedaan dan gentar menyatakan negaranya sebagai negara sekuritisasi terhadap proses-proses penolakan yang pernah dilakukan kepada Komisi Eropa terhadap kebijakan pemerataan pengungsi Timur Tengah.

Kritikan-kritikan tersebut menjadi basis penelitian peneliti untuk melihat lebih jauh dan mempertanyakan mengapa negara Hungaria sampai akhirnya mau untuk memutuskan dan memberlakukan kebijakan terbuka kepada pengungsi Ukraina. Kepatuhan hal-hal normatif, dan proses pengambilan keputusan akan dilihat oleh peneliti dari berbagai aspek yang akan diteliti melalui kacamata hubungan Internasional. Kebijakan standar ganda negara Hungaria sebagai referent objek penelitian, mengingatkan untuk tidak melupakan aktor pengambilan keputusan sebagai aktor yang menjelaskan perilaku negara, yang memberikan output atas timbulnya konsekuensi perhatian dunia Internasional. Karena hal tersebut bisa menjadi persoalan dan pembahasan yang kurang baik dalam kajian hubungan internasional melalui proses politik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus memahami dunia sosial melalui interpretasi dari penulis.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yang juga diperkaya oleh studi kasus, dengan mendalami beberapa aktor seperti individu, kelompok, organisasi internasional, negara dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan suatu negara sebagai metode mendeskripsikan

---

<sup>10</sup> Alan Bryman. ( 2012) Social research methods 4<sup>th</sup> Edition (London : Oxford University Press,380.

suatu kejadian secara mendalam yang berguna untuk mengetahui inti dari pembahasan kasus yang diangkat.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari situs atau laporan resmi pemerintah, buku, jurnal, media massa, dan sumber-sumber kredibel lainnya. Tujuan analisis data sekunder harus transparan, merinci, dan memperimbangkan segi metodologis dan etis serta menjelaskan setiap keputusan yang dibuat mengenai data yang hilang, sehingga interpretatif produksi pengetahuan adalah transparan. Pengumpulan data sekunder juga membantu untuk mengumpulkan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat sehingga penelitian bisa memperoleh kesimpulan akhir.

## **PEMBAHASAN**

Pembuatan keputusan perubahan kebijakan luar negeri Hungaria dengan menerapkan sistem double standard terhadap pengungsi Ukraina dan Timur Tengah menjelaskan bagaimana antar aktor-faktor saling berkaitan satu sama lain dalam membentuk proses pembuatan keputusan yang mendorong adanya tindakan di tingkat negara terhadap hal ini. Meskipun sudah diketahui secara jelas bahwa terdapat aktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembuat kebijakan, yang dalam hal ini Perdana Menteri Viktor Orbán dan Partai Fidesz. Dalam hal ini aktor dan faktor domestik bisa dikerucutkan seperti, pertama yakni Perdana Menteri Viktor Orbán dan Partai Fidesz sebagai aktor, lalu kedua adalah faktor yakni keadaan sosial domestik berupa respon warga negara terhadap pengungsi Ukraina dan Timur Tengah, termasuk Voting ataupun Xenophobia. Selanjutnya kepentingan nasional termasuk keadaan politik dalam negeri yang menjadi wadah bagi para pembuat keputusan dan tentang bagaimana hal-hal yang dikonstruksi terhadap berbagai kepentingan yang ada seperti ekonomi, budaya, dan hal lain yang menjadi kaitan dalam kepentingan nasional. Lebih lanjut, faktor internal disini juga berkaitan dengan pengalaman sejarah dan hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan negara asal pengungsi, baik itu negara hubungan Hungaria dengan Ukraina ataupun Timur Tengah.

Ketiga hal tersebut merupakan perumusan kebijakan luar negeri yang dalam merumuskan suatu kebijakan, terdapat pertimbangan yang menjadi landasan berupa identitas yang melekat dan tidak dapat dipisahkan oleh Hungaria. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana aktor-faktor tersebut berinteraksi dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Hungaria sebagai pendekatan yang membantu menjelaskan alasan mendasar di balik perubahan sikap Hungaria terhadap pengungsi Ukraina yang dilakukan berbeda dibandingkan dengan pengungsi Timur Tengah.

## **ALASAN HUNGARIA MENERAPKAN DOUBLE STRANDARD POLICY**

### **A. Faktor Historis Sebagai Arah Kebijakan Hungaria**

#### **a). The Memory of Trianon – Penerimaan Pengungsi Ukraina**

Perbedaan sikap Hungaria terhadap pengungsi Ukraina dan Timur Tengah dapat dijelaskan melalui trauma historis yang dikenal sebagai "The Memory of Trianon". Kedekatan budaya dan sejarah dengan Ukraina membuat Hungaria lebih reseptif terhadap pengungsi dari negara tersebut, sementara warisan konflik historis dengan Timur Tengah menyebabkan sikap yang lebih ketat.

Trauma ini berakar pada Perjanjian Trianon 1920, yang mengakibatkan Hungaria kehilangan sebagian besar wilayah dan penduduknya. Dampaknya masih terasa hingga generasi saat ini, meskipun mereka tidak mengalami peristiwa tersebut secara langsung.

Pemerintah Hungaria merespons trauma ini melalui Act No. 45 of 2010 on The Testimony For National Cohesion. Undang-undang ini mencerminkan upaya pemulihan persatuan identitas nasional, terutama dalam penyatuan kembali etnis Hungaria yang terpisah akibat Perjanjian Trianon.

Feischmidt menjelaskan dua pendekatan utama dalam upaya ini:

1. Memosisikan etnis Hungaria di negara-negara tetangga sebagai 'korban' untuk mengekspresikan rasa kehilangan kolektif.



2. Mengupayakan reunifikasi nasional dengan menyatukan kembali etnis Hungaria yang tersebar.

Act No. 45 of 2010 secara eksplisit menyatakan keinginan Hungaria untuk menyatukan identitas nasional dan mengatasi dampak Perjanjian Trianon. Undang-undang ini juga bertujuan untuk berkontribusi pada masa depan yang damai di kawasan Cekungan Karpatia dan menyatukan kembali Eropa.

Implementasi praktis dari kebijakan ini terlihat dalam penerimaan pengungsi etnis Hungaria dari Ukraina selama invasi Rusia 2022. Dengan memprioritaskan penerimaan mereka, pemerintah Hungaria secara efektif berupaya "mengumpulkan kembali" komunitas etnis Hungaria yang terpisah akibat Perjanjian Trianon. Pemahaman tentang trauma historis ini membantu menganalisis kompleksitas kebijakan luar negeri Hungaria, khususnya dalam menanggapi isu-isu sensitif seperti krisis pengungsi dan konflik regional.

#### **b). Kekaisaran Ottoman Turki - Penolakan Hungaria terhadap Pengungsi Timur Tengah**

Hungaria memiliki sikap penolakan terhadap pengungsi Timur Tengah yang dipengaruhi oleh sejarah pendudukan Kekaisaran Ottoman Turki. Pengalaman historis ini berdampak pada identitas nasional Hungaria dan digunakan oleh politisi kontemporer untuk membenarkan kebijakan anti-imigrasi.

Kekaisaran Ottoman Turki menguasai sebagian besar wilayah Hungaria selama hampir 150 tahun (1526-1699). Periode "Hungaria Ottoman" ini membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial, politik, dan demografis negara tersebut, termasuk masuknya Islam ke wilayah yang sebelumnya didominasi Kristen.

Perdana Menteri Viktor Orban menggunakan narasi sejarah ini untuk memproyeksikan ancaman terhadap identitas Kristen Hungaria dan keamanan nasional. Pada tahun 2015, saat puncak krisis pengungsi Eropa, Orban menyatakan penolakan terhadap pengungsi yang dianggap tidak ingin beradaptasi dengan cara hidup Hungaria.

Pemerintah Hungaria menerapkan kebijakan pembatasan imigrasi dan pencari suaka, termasuk pengesahan undang-undang "Stop Soros" pada 2018 yang mengkriminalisasi bantuan kepada imigran ilegal. Orban sering menghubungkan kebijakan ini dengan sejarah Hungaria, menekankan peran negara sebagai "pertahanan terakhir Eropa Kristen".

Meskipun kebijakan-kebijakan ini mendapat kritik dari Uni Eropa dan organisasi hak asasi manusia internasional, Orban dan pendukungnya berpendapat bahwa tindakan tersebut penting untuk mempertahankan identitas nasional dan keamanan Hungaria.

## **B. KONDISI SOSIAL DOMESTIK NEGARA HUNGARIA TERHADAP PENGUNGGI UKRAINA DAN TIMUR TENGAH**

### **a). Xenophobia dan Islamophobia**

Xenofobia dan Islamofobia di Hungaria meningkat tajam sejak krisis pengungsi Eropa 2015. Di bawah kepemimpinan Viktor Orbán, Hungaria mengadopsi sikap keras terhadap imigrasi, terutama dari negara non-Eropa. Orbán menyatakan imigrasi sebagai ancaman terhadap identitas nasional dan keamanan Hungaria.

Data menunjukkan peningkatan sentimen anti-imigran:

- 82% warga Hungaria menganggap pengungsi sebagai beban pada 2016, naik dari 69% tahun 2015.
- Kejahatan bermotif kebencian meningkat dari 48 kasus (2014) menjadi 201 kasus (2015).
- 72% warga Hungaria memiliki pandangan negatif terhadap Muslim (2016).

Pemerintah Hungaria mengambil langkah konkret membatasi imigrasi:

- Membangun pagar kawat berduri di perbatasan dengan Serbia dan Kroasia (2015).
- Mengesahkan undang-undang penahanan otomatis pencari suaka (2017).

Kontras dengan sikap terhadap pengungsi Timur Tengah, Hungaria lebih terbuka terhadap pengungsi Ukraina sejak invasi Rusia 2022:

- Menerima lebih dari 30.000 pengungsi Ukraina hingga akhir 2022.
- Menawarkan bantuan darurat kepada pengungsi Ukraina.
- 80% warga Hungaria mendukung penerimaan pengungsi Ukraina, sementara hanya 36% mendukung penerimaan pengungsi lain.

Perbedaan perlakuan ini mencerminkan bias etnis dan kultural yang kuat, di mana pengungsi Ukraina dianggap lebih mirip secara budaya dan lebih mudah berintegrasi ke dalam masyarakat Hungaria.

### **b). Jajak Pendapat Publik**

Jajak pendapat publik di Hungaria menunjukkan perubahan sikap terhadap pengungsi:

#### 1. Survei TÁRKI 2015:

- 46% responden menolak masuknya pencari suaka ke Hungaria (meningkat dari 29%)
- Sentimen ini diperkuat narasi politik pemerintah Viktor Orbán

#### 2. Pernyataan Orbán September 2015:

- Menolak minoritas Muslim signifikan di Hungaria
- Khawatir perubahan demografi dan budaya Eropa

#### 3. Perubahan sikap saat krisis Ukraina 2022:

- Survei International Republican Institute: 80% warga mendukung penerimaan pengungsi Ukraina
- Orbán menyatakan dukungan untuk pengungsi Ukraina

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap:

- Kedekatan geografis dan kultural dengan Ukraina
- Strategi pemerintah mempertahankan citra positif

- Bias etnis dan kultural dalam masyarakat Hungaria

Namun, perubahan sikap ini tidak serta-merta menghapus xenofobia dan islamofobia yang telah mengakar. Kebijakan anti-imigran bertahun-tahun telah membentuk persepsi publik yang sulit diubah cepat.

Dinamika opini publik Hungaria mencerminkan kompleksitas interaksi antara kebijakan pemerintah, sentimen masyarakat, dan realitas geopolitik. Perubahan sikap terhadap pengungsi Ukraina menunjukkan bahwa persepsi publik dapat berubah tergantung konteks dan narasi politik dominan.

### **c). Budaya Kristen sebagai bagian dari Identitas Hungaria**

Kekristenan telah menjadi bagian integral dari identitas nasional Hungaria sejak Raja Santo Stephen I menerima mahkota dari Paus pada tahun 1000 M. Selama berabad-abad, Hungaria telah mengidentifikasi dirinya sebagai "benteng Kekristenan" di Eropa. Warisan Kristen ini telah membentuk nilai-nilai, tradisi, dan pandangan dunia masyarakat Hungaria, serta menjadi elemen kunci dalam pembentukan identitas nasional mereka.

Berdasarkan data sensus terakhir yang tersedia dari tahun 2011, sekitar 54,2% penduduk Hungaria mengidentifikasi diri sebagai Kristen, dengan 37,1% Katolik Roma, 11,6% Protestan Calvinis, 2,2% Lutheran, dan 3,3% denominasi Kristen lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa 27,2% penduduk memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tentang agama, dan 16,7% menyatakan diri sebagai non-religius, dan agama Islam, meskipun memiliki sejarah panjang di Hungaria, hanya dianut oleh sekitar 0,1% penduduk.

Meskipun jumlah penganut Islam relatif kecil, persepsi terhadap Islam dan Muslim di Hungaria telah menjadi isu yang kontroversial, terutama sejak krisis pengungsi Eropa tahun 2015. Pemerintah Hungaria, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orbán, telah secara eksplisit menyatakan kekhawatiran tentang ancaman yang ditimbulkan oleh imigrasi Muslim terhadap identitas Kristen Eropa. Dalam sebuah pidato pada tahun 2015, Viktor Orbán menyebutkan bahwa Eropa dan budaya Eropa memiliki akar Kristen. Sedangkan pengungsi mayoritas berasal dari Timur Tengah yang memiliki akar Islam mengancam identitas Eropa. Sehingga, perlu

tindakan untuk membendung gelombang pengungsi Timur Tengah yang datang ke 60 Eropa untuk melindungi identitas Eropa.

Sikap ini tercermin dalam kebijakan pemerintah Hungaria terhadap pengungsi dari Timur Tengah. Pada tahun 2015, Hungaria membangun pagar perbatasan, dan pada Juni 2018 mengesahkan UU kriminalisasi terhadap pengungsi Timur Tengah.<sup>1</sup>

Perkembangan kekristenan di Hungaria dalam menghadapi isu pengungsi telah menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan tanggung jawab kemanusiaan. Sementara beberapa pemimpin gereja telah menyerukan solidaritas dengan pengungsi, banyak yang tetap mendukung posisi pemerintah. Misalnya, pada tahun 2016, Uskup Agung Katolik Roma Hungaria, Péter Erdő, menyatakan bahwa gereja akan membantu pengungsi "sesuai dengan hukum yang berlaku", namun juga menekankan pentingnya melindungi identitas nasional.

Pernyataan pemerintah Hungaria terus menekankan pentingnya melindungi identitas Kristen negara tersebut. Pada Konferensi Demografi Internasional Budapest pada September 2019, Perdana Menteri Orbán menyatakan, "Kami percaya bahwa mempertahankan identitas Kristen kami akan membantu kami bertahan hidup sebagai bangsa". Pernyataan semacam ini mencerminkan pandangan bahwa identitas nasional dan agama saling terkait erat dalam konteks Hungaria.

### **C. KEPENTINGAN NASIONAL NEGARA HUNGARIA**

#### **a). Perspektif Victor Orban dan Partai Fides Sebagai Arah Perubahan Kebijakan Luar Negeri Hungaria.**

Tentu, saya akan memberikan parafrase yang lebih detail namun tetap ringkas:

Victor Orban, Perdana Menteri Hungaria dan pemimpin Partai Fidesz, mengubah sikapnya terhadap pengungsi Ukraina pada 2022, berbeda dengan kebijakan anti-imigran sebelumnya. Perubahan ini didasari oleh faktor identitas nasional dan kepentingan strategis Hungaria.

Orban dan Fidesz memprioritaskan reunifikasi budaya dengan etnis Hungaria di luar wilayahnya. Mereka menerima pengungsi Ukraina, memandang mereka sebagai "tetangga Kristen" yang dekat secara budaya dan historis. Ini kontras dengan sikap mereka terhadap pengungsi Muslim dari Timur Tengah.

Pemerintah Hungaria menekankan bahwa menerima pengungsi Ukraina adalah tanggung jawab moral dan kepentingan strategis, termasuk potensi manfaat ekonomi. Namun, mereka tetap mempertahankan retorika nasionalis dan sikap skeptis terhadap bantuan internasional.

Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, Hungaria mengambil posisi 'netral', menolak pengiriman senjata melalui wilayahnya. Partai Fidesz menggunakan isu ini untuk memperkuat narasi nasionalis dan mengkritik kebijakan Uni Eropa.

Strategi ini mencerminkan upaya Hungaria untuk memperkuat posisinya di kawasan, mempertahankan hubungan baik dengan negara tetangga (termasuk Rusia), sambil tetap menjaga identitas nasional. Orban berfokus pada peluang dan penyesuaian strategi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, sejalan dengan nilai-nilai politik Hungaria: keluarga, bangsa, dan Tuhan.

#### **b). Kondisi Ekonomi Hungaria Sebagai Kepentingan Nasional Hungaria**

Hungaria menunjukkan respons ekonomi berbeda terhadap pengungsi Timur Tengah (2015) dan Ukraina (2022). Pada 2015, meski ekonomi membaik pasca krisis 2008, Hungaria bersikap keras terhadap pengungsi Timur Tengah, menganggap mereka ancaman ekonomi. Pemerintah mengalokasikan 84 juta euro untuk penanganan krisis, termasuk pembangunan pagar perbatasan.

Kontras pada 2022, di tengah tantangan ekonomi akibat COVID-19, Hungaria menerima pengungsi Ukraina. Pemerintah mengalokasikan 500 juta euro dan melihat mereka sebagai potensi positif untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Meski ada kekhawatiran terkait inflasi (22,5% November 2022) dan tekanan pada layanan publik, dampak ekonomi

pengungsi Ukraina tidak signifikan mengancam kepentingan nasional Hungaria.

Perubahan sikap ini mencerminkan perbedaan persepsi Hungaria terhadap kedua kelompok pengungsi dari sudut pandang ekonomi dan kepentingan nasional.

### **c). Hak Veto Sebagai Representasi Identitas Hungaria**

Hungaria menggunakan hak vetonya di Uni Eropa (UE) sebagai alat untuk menegaskan identitas nasional dan melindungi kepentingan negaranya. Penggunaan hak veto ini mencerminkan penekanan Hungaria pada kedaulatan nasional dan perlindungan nilai-nilai tradisional.

Pada 2015, saat puncak krisis pengungsi Timur Tengah, Hungaria dengan tegas menolak skema relokasi pengungsi UE. PM Viktor Orbán menyatakan penolakan terhadap "diktasi Brussel" yang dianggap mengancam identitas dan keamanan nasional. Hungaria, bersama Slovakia, bahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Eropa menentang skema ini, meskipun akhirnya ditolak pada 2017.

Menariknya, meski sikap terhadap pengungsi Ukraina berbeda, Hungaria tetap menggunakan hak vetonya dalam urusan bantuan. Pada 2022, Hungaria memveto paket bantuan UE senilai 18 miliar euro untuk Ukraina, berargumen bahwa bantuan tersebut akan membebani anggaran UE dan berpotensi merugikan kepentingan ekonomi negara-negara anggota.

Penggunaan hak veto ini juga mencerminkan dinamika politik domestik Hungaria. Retorika nasionalis dan anti-UE telah menjadi bagian integral dari strategi politik Partai Fidesz yang berkuasa. Dengan menentang kebijakan UE yang dianggap merugikan kepentingan Hungaria, pemerintah dapat memperkuat dukungan domestik dan mempertahankan citra sebagai pelindung kepentingan nasional.

Orbán sering menyatakan bahwa Hungaria tidak ingin menjadi "negara kelas dua" di UE dan bahwa suara Hungaria harus didengar dan dihormati dalam pengambilan keputusan UE. Sikap ini, meskipun sering dikritik oleh negara-

negara UE lainnya sebagai tidak solidar, dilihat oleh Hungaria sebagai cara untuk mempertahankan harga diri nasional dan menegaskan posisinya di dalam UE.

#### **d). Kerjasama yang dilakukan bersama Visegrad Group**

Visegrad Group (V4), yang terdiri dari Hungaria, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia, menjadi platform penting bagi Hungaria dalam mengkoordinasikan kebijakan regional, termasuk isu pengungsi. Pada 2015, V4 bersikap tegas menentang skema relokasi pengungsi wajib UE untuk pengungsi Timur Tengah, dengan alasan melindungi perbatasan dan identitas nasional.

Kontras pada 2022, V4 termasuk Hungaria lebih terbuka terhadap pengungsi Ukraina. Negara-negara V4 menerima jumlah signifikan pengungsi Ukraina, dengan Polandia menerima lebih dari 1,5 juta dan Hungaria lebih dari 31.000 hingga Desember 2022.

Meskipun ada perbedaan pendapat dalam beberapa aspek kebijakan terkait Ukraina (seperti sikap Hungaria terhadap sanksi Rusia), kerjasama V4 tetap bertujuan melindungi kepentingan nasional sambil berperan dalam konteks regional. Bagi Hungaria, kerjasama ini memperkuat posisinya di UE dan memungkinkan penyuaran keprihatinan tentang kedaulatan nasional dan identitas budaya.

Perbedaan sikap terhadap pengungsi Timur Tengah dan Ukraina mencerminkan pertimbangan kepentingan nasional dan regional yang berbeda, dengan penerimaan pengungsi Ukraina dianggap sejalan dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi regional.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian "Double Standard Kebijakan Negara Hungaria terhadap Pengungsi Ukraina dan Timur Tengah" mengungkap kompleksitas kebijakan pengungsi Hungaria yang dipengaruhi oleh faktor historis, sosial, dan politis. Menggunakan teori Konstruktivisme identitas model constitutive localization,



penelitian ini menggali pembentukan kebijakan Hungaria berdasarkan identitas dan pengalaman sejarahnya.

Faktor historis seperti The Memory of Trianon dan sejarah dengan Kekaisaran Ottoman Turki mempengaruhi sikap berbeda terhadap pengungsi Ukraina dan Timur Tengah. Kondisi sosial domestik, termasuk xenophobia, Islamophobia, dan identitas Kristen yang kuat (76% penduduk), juga berperan.

Kepentingan nasional Hungaria, perspektif Victor Orban dan Partai Fidesz, serta kondisi ekonomi (PDB per kapita \$18,075 pada 2021) mempengaruhi kebijakan pengungsi. Penggunaan hak veto dalam UE menjadi representasi identitas dan kedaulatan nasional.

Kerjasama dengan Visegrad Group (V4) yang skeptis terhadap imigrasi massal juga mempengaruhi kebijakan Hungaria. Meski dianggap standar ganda, kebijakan ini mencerminkan interaksi rumit antara faktor historis, sosial, ekonomi, dan geopolitik yang membentuk identitas dan kepentingan nasional Hungaria.

## DAFTAR PUSTAKA

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS MELLETTI TANÚSÁGTÉTELRŐL SZÓLÓ 2010. ÉVI XLV. TÖRVÉNY ACT NO. 45 OF 2010 ON THE TESTIMONY FOR NATIONAL COHESION. (n.d.). Retrieved July 27, 2024, from <https://www.vajma.info/docs/Nemzeti-osszetartozas-torveny.pdf>

Alan Bryman. (2012) Social research methods 4th Edition (London : Oxford University Press,380.

Amelia, S. (2022a) Standar Ganda Polandia Terhadap Pengungsi dalam Kerangka Keamanan: Studi Kasus Krisis Pengungsi Tahun 2015 dan 2022 [Preprint].

Aziza, N. (2019) KEBIJAKAN HUNGARIA TERHADAP PENGUNSI DI EROPA PADA 2015-2017. thesis.

Bozóki, A., & Hegedűs, D. (2018). An externally constrained hybrid regime: Hungary in the European Union. *Democratization*, 25(7), 1173-1189. Diakses pada 25 Juli 2024

Clayton, J.C. and Holland, H. (2015) Over one million sea arrivals reached Europe in 2015, UNHCR. Available at: <https://www.unhcr.org/news/stories/over-one-million-sea-arrivals-reach-europe-2015> (Accessed: 24 May 2023).

Court of Justice of the European Union. (2017). Judgment in Joined Cases C-643/15 and C-647/15 Slovakia and Hungary v Council. Diakses pada 25 Juli 2024

Euronews. (2015, September 4). Migrant crisis: Hungary's Orban urges EU to give Syria's neighbors more aid. Diakses pada 20 Juni 2023

Euronews. (2015, September 4). Migrant crisis: Hungary's Orban urges EU to give Syria's neighbors more aid. Diakses pada 20 Juni 2023

Eurostat. (2022). Unemployment statistics. Diakses pada 25 Juli 2024

Fedinec, C., & Csernicsekó, I. (2017). (In)voluntary Identity: Mandatory Ukrainian Education for Minorities. *Hungarian Journal of Minority Studies*, hal,99., Diakses pada 15 Juli 2024

Feischmidt, M. (2020). Memory-Politics and Neonationalism: Trianon as mythomoteur. *Nationalities* <https://doi.org/10.1017/nps.2018.72> Papers, 48(1), p.130. Diakses pada 15 Juli 2024

Financial Times. (2021, July 16). Viktor Orban: Hungary will not be a "colony" and will not live according to the "commands" of Brussels. Diakses pada 25 Juli 2024

Hungarian Central Statistical Office. (2022). Consumer Price Index. Diakses pada 25 Juli 2024

Hungarian Central Statistical Office. (2022). Labour market statistics. Diakses pada 25 Juli 2024

Hungarian Government. (2015). 2015 Budget Allocation for Refugee Crisis Management.

Hungarian Government. (2022). 2022 Budget Allocation for Ukrainian Refugee Support. Diakses pada 25 Juli 2024

Hungarian Government. (2022). Statement by Balázs Orbán on Hungary's position regarding EU aid to Ukraine. Diakses pada 25 Juli 2024

Hungary Accepted the Largest Number of Refugees per Capita From Ukraine (2022) EU/Schengen Hungary . Available at: <https://www.schengenvisainfo.com/news/hungary-accepted-the-largest-number-of-refugees-per-capita-from-ukraine/> (Accessed: 30 May 2023) 1 Wangke, Humphrey. 2016. Krisis Migran dan Masa Depan Integrasi Eropa, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. 8 No.3 (Februari) hlm 5-8.

Hungary Accepted the Largest Number of Refugees per Capita From Ukraine (2022) EU/Schengen Hungary . Available at: <https://www.schengenvisainfo.com/news/hungary-accepted-the-largest-number-of-refugees-per-capita-from-ukraine/> (Accessed: 30 May 2023).

Ibid

IMF. (2022). World Economic Outlook Database. Diakses pada 25 Juli 2024

Kántor, Z. (2014). Hungary's Kin-State Politics, 2010–2014. *Minority Studies*, 17, hal 23., Diakses pada 15 Juli 2024

Kóczán, G. (2022). The Ukrainian Refugee Crisis: The Hungarian Response. *European Journal of Migration and Law*, 318., Diakses pada 15 Juli 2024

Krekó, P., & Szicherle, P. (2018). Why Is Hungary Blocking Ukraine's Western Integration? Atlantic Council. Diakses pada 25 Juli 2024

Ministry of Economic Development. (2022). Official statement on Ukrainian refugees and Hungarian economy. Diakses pada 25 Juli 2024

Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary. (2016). Official statement by Minister Péter Szijjártó on EU migration policy. Diakses pada 25 Juli 2024  
Politico. (2022, December 6). Hungary vetoes €18B Ukraine aid package. Diakses pada 25 Juli 2024

Mohatt, N. V., Thompson, A. B., Thai, N. D., & Tebes, J. K. (2014). Historical trauma as public narrative: A conceptual review of how history impacts present-day health. *Social Science & Medicine*, 106(1), 128-136. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.01.043., Diakses pada 15 Juli 2024

Monte, M.D. and Orav, A. (2023) Solidarity in EU asylum policy, EPRS | European Parliamentary Research Service. Available at: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649344/EP\\_RS\\_BRI\(2020\)649344\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649344/EP_RS_BRI(2020)649344_EN.pdf) (Accessed: 22 May 2023).

National Bank of Hungary. (2022). Quarterly Report on Inflation. Diakses pada 25 Juli 2024

Reuters. (2015, September 3). Hungary PM Orban: We don't want more Muslim refugees. Diakses pada 25 Juli 2024

Reuters. (2015, September 4). Hungary PM Orban: We don't want more Muslim refugees. Diakses pada 25 Juli 2024

Reuters. (2015, September 4). Hungary PM Orban: We don't want more Muslim refugees. Diakses pada 25 Juli 2024

Reuters. (2015, September 8). Hungary says migrant influx 'stops' economic growth. Diakses pada 25 Juli 2024

Sabic, S.S. (2017b) The Relocation of Refugees in the European Union Implementation of Solidarity and Fear. Available at: [https://www.researchgate.net/publication/320452615\\_The\\_Relocation\\_of\\_Refugees\\_in\\_the\\_European\\_Union\\_Implementation\\_of\\_Solidarity\\_and\\_Fear](https://www.researchgate.net/publication/320452615_The_Relocation_of_Refugees_in_the_European_Union_Implementation_of_Solidarity_and_Fear) (Accessed: 22 May 2023).

1Society (2022) Humanitarian council : Hungary received largest number of refugees per capita.

UKRAINE SITUATION FLASH UPDATE #1 ' (2022a) UNHCR Regional Bureau for Europe [Preprint].

UNHCR. (2016). Hungary Asylum Statistics. Diakses pada 25 Juli 2024

Visegrad Group. (2015, September 4). Joint Statement of the Heads of Government of the Visegrad Group Countries. Diakses pada 25 Juli 2024

World Bank. (2022). GDP growth (annual %) - Hungary. Diakses pada 25 Juli 2024